

PENGUATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURBALINGGA**

MENUJU SATU DATA INDONESIA



purbalinggakab.bps.go.id



[@bpskabpurbalingga](https://www.facebook.com/bpskabpurbalingga)



[@bps_purbalingga](https://twitter.com/bps_purbalingga)



[@bps_purbalingga](https://www.instagram.com/bps_purbalingga)

KERANGKA PAPARAN

1

PENDAHULUAN

2

KUALITAS DATA DAN NSPK

3

KEBUTUHAN STATISTIK SEKTORAL

4

PEMBINAAN STATISTIK DI DAERAH



PENDAHULUAN

3 JENIS STATISTIK

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik



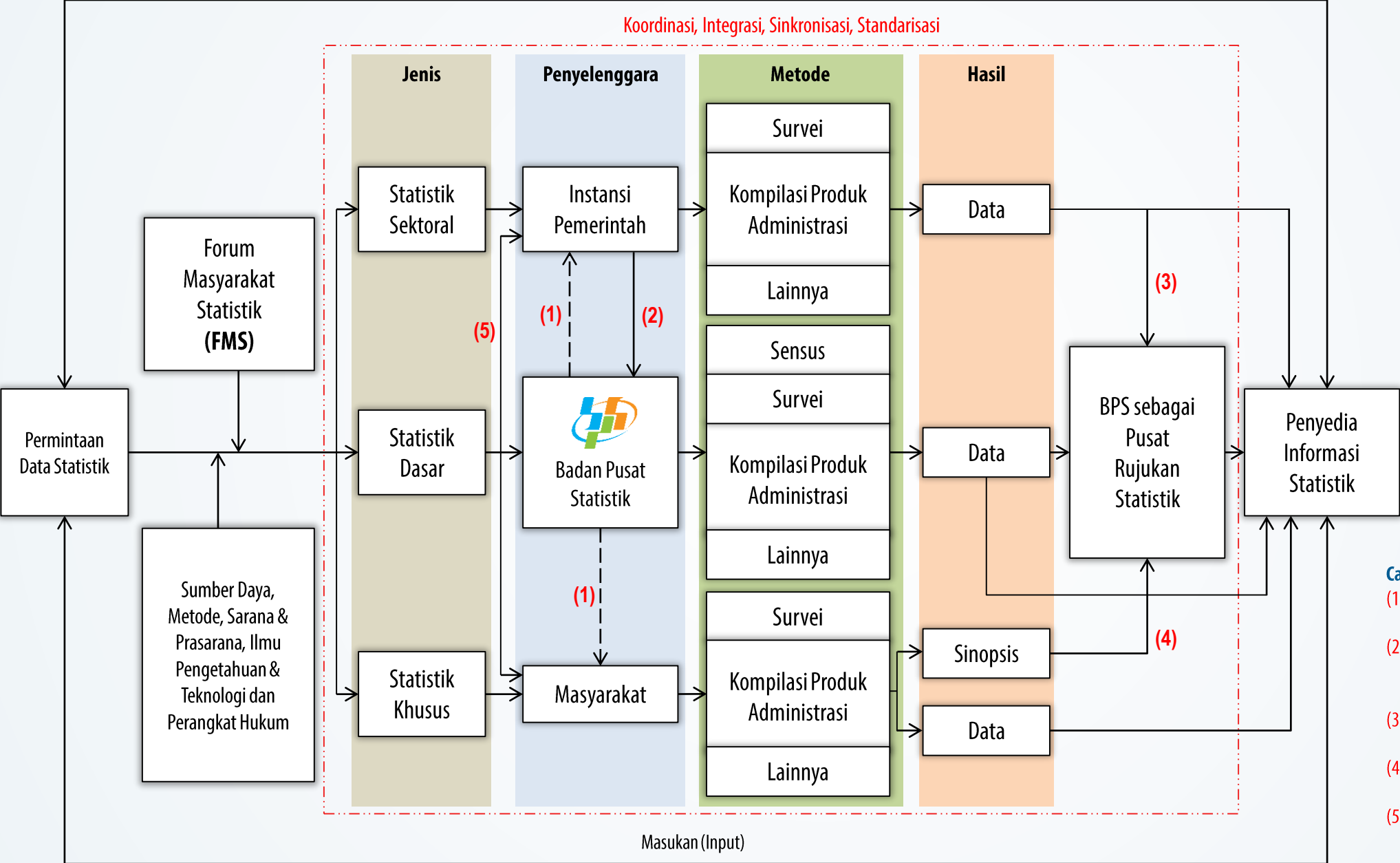
Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- **Statistik Dasar**
dikumpulkan oleh BPS
- **Statistik Sektor**
Dikumpulkan oleh instansi
- **Statistik Khusus**
Dikumpulkan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Statistik :

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
5. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
7. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)



- Catatan:**
- (1) BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik
 - (2) Instansi Pemerintah menyerahkan rencana survei dan BPS memberikan rekomendasi
 - (3) Instansi pemerintah menyerahkan hasil ke BPS (Pusat Rujukan Statistik)
 - (4) Masyarakat atau individu mengumpulkan sinopsis kepada BPS
 - (5) Instansi pemerintah/swasta & masyarakat berkoordinasi dengan BPS

Tabel 1. Contoh Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus

Jenis Statistik	Statistik Dasar	Statistik Sektoral	Statistik Khusus
Indikator	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Jumlah Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau	Jumlah Pelanggan Data Telkomsel
Kegiatan	Susenas	Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK 2011)	Kompilasi Produk Administrasi
Penyelenggara	BPS	Kementan dan BPS	Telkomsel
Walidata (disseminater)	BPS	Kementan (instansi pemerintah)	Telkomsel
Manfaat	Bersifat luas, lintas sektor, makro, dan berskala nasional	Kebutuhan Kementerian Pertanian	Kebutuhan spesifik dunia usaha

SATU DATA INDONESIA (SDI)

Tujuan Perpres SDI

Mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar Rencana Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian melalui perbaikan tata kelola data pemerintah

Prinsip Perpres SDI

- ▶ Satu Standar Data
- ▶ Satu Metadata Baku
- ▶ Interoperabilitas Data
- ▶ Satu Kode Referensi
- ▶ Satu Portal Data

Produk BPS

WEBSITE BPS

- ▶ www.bps.go.id
- ▶ Jumlah dan variasi konten yang banyak
- ▶ Menyediakan data **statistik dasar dan sektoral**
- ▶ Dapat diunduh dalam *machine readable format* (excel dan csv)
- ▶ Tersedia *Application Programming Interface* (API) untuk interoperabilitas data melalui *machine to machine*

PUBLIKASI

- ▶ Statistik Indonesia, Daerah Dalam Angka (DDA), dll.
- ▶ Menyajikan data statistik dasar dan sektoral

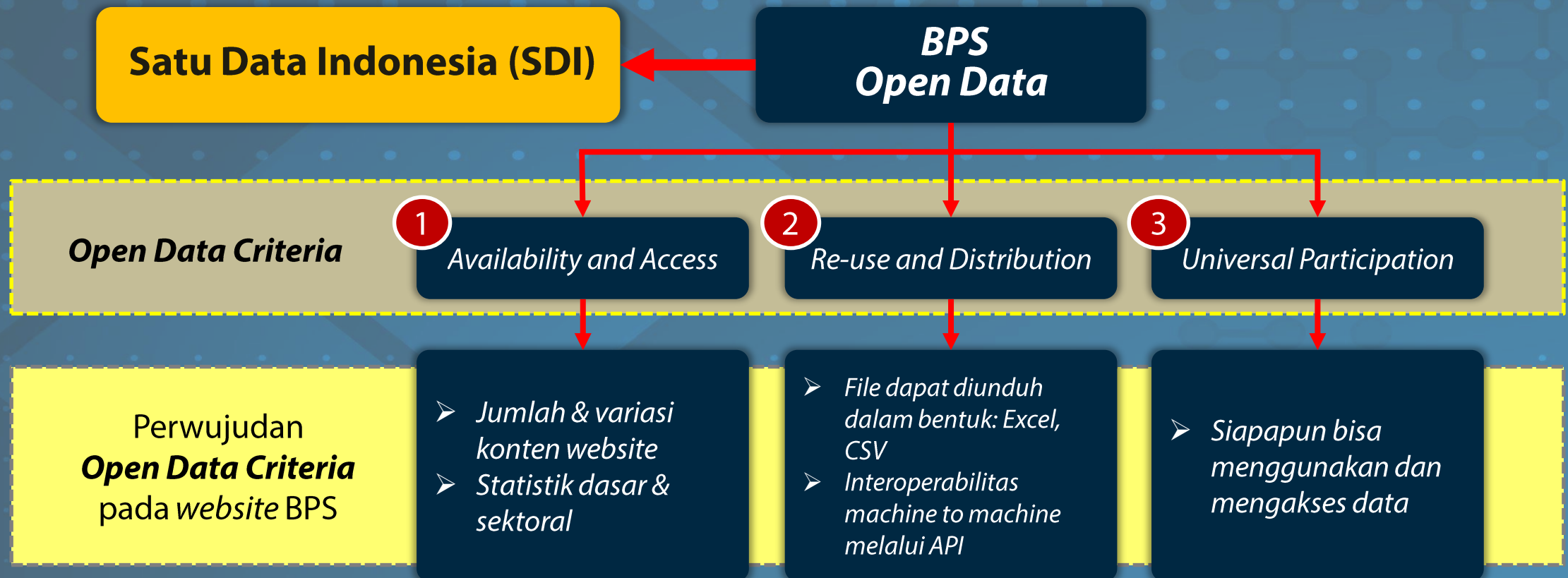
METADATA

- ▶ Pengumpulan metadata statistik dasar dan sektoral

REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

- ▶ www.sirusa.bps.go.id

Website BPS: BPS Open Data Untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia



Penilaian implementasi open data terhadap website BPS secara rutin dilakukan oleh **Open Data Watch**

**Jumlah & Variasi
Konten
Website BPS**
(Per 25 November 2017)

74.102
Judul Publikasi


62.704
Judul BRS

66.643
Tabel Statis/Dinamis

► Infografis ◀
► Indikator strategis ◀
► Metadata ◀
► Berita Kegiatan ◀
► Katalog Data Mikro ◀

**Tematik Interaktif,
Code Bridging**
sig-dev.bps.go.id



 **BADAN PUSAT STATISTIK** **TOP 35**
SELAMAT! WEBSITE
TERPILIH DALAM IN
PUBLIK NASIONAL

Beranda Tentang Kami ▾ Berita Senarai R

Beranda »

Sosial dan Kependudukan ▾

Gender
Geografi
Iklim [Selengkapnya...](#)

Ekonomi dan Perdagangan ▾

Ekspor-Impor
Energi
Harga Eceran [Selengkapnya...](#)

Pertanian dan Pertambangan ▾

Hortikultura
Kehutanan
Perikanan [Selengkapnya...](#)

INDIKATOR STRATEGIS
Galeri Infografis

Tabel Statistik

02 Februari 2018

- [HARGA PERDAGANGAN BESAR] - Ind...
- [INFLASI] - Perbandingan Indeks dan Tir...
- [HARGA PERDAGANGAN BESAR] - Per...
- [HARGA PERDAGANGAN BESAR] - Ind...
- [HARGA PERDAGANGAN BESAR] - Ind...
- [INFLASI] - Perbandingan Indeks dan Tir...
- [INFLASI] - Perbandingan Indeks dan Tir...

JADWAL JUMPA PERS
01 Februari 2018
Berita Resmi Statistik

 **BADAN PUSAT STATISTIK**




Beranda WILAYAH KERJA STATISTIK | PETA INTERAKTIF | PUBL

Sistem Informasi Geografis

Selamat datang di Sistem Informasi Geospasial-BPS. Situs ini bertujuan untuk menyajikan kepada publik berbagai informasi yang terkait dengan kerangka wilayah kerja statistik, peta, dan data.

Wilayah kerja statistik (wilkerstat) menyajikan tiga hal utama yaitu: **Hierarki** menggambarkan tingkatan wilkerstat, **Sistem Pengkodean** menjelaskan tata cara pemberian kode wilayah, dan **Kode relasi** yang menghubungkan sistem pengkodean wilayah antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kode Pos.

Peta yang disajikan pada situs ini dikelompokkan menjadi dua jenis utama yaitu **Peta Interaktif** dan **Peta Analog**. **Peta Interaktif** terdiri dari: (1) **Peta Tematik** atau peta statistik yang menyajikan informasi dengan tema sosial dan kependudukan, pertanian dan ekonomi; (2) **Peta indeks** menyajikan kerangka wilayah kerja statistik dalam bentuk spasial. **Peta Analog** merupakan kumpulan peta tematik yang disajikan kedalam format siap cetak.


Badan Pusat Statistik
BPS - Statistik Indonesia
Jl. Dr. Subomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (02-21) 3541195, 3542508, 3510291, Faks (02-21) 3557948, Mailbox: bps@bps.go.id
Hal. Cipta © 2017 Badan Pusat Statistik
Semua Hak Dilindungi

KUALITAS DATA DAN NSPK

KUALITAS DATA

Kualitas Statistik (Handbook BPS-QAF):

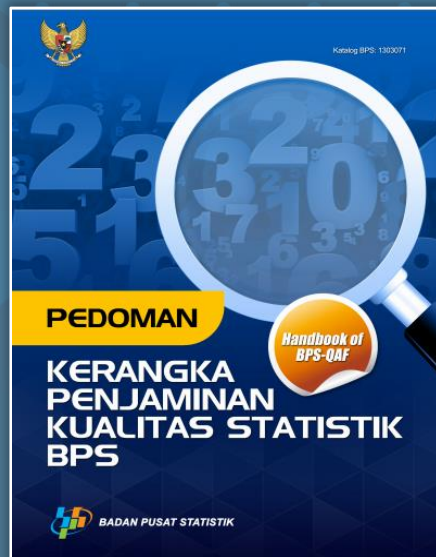
“Kemampuan Data/Informasi Statistik yang Dihasilkan BPS Memenuhi Standar-standar Kualitas Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Pengguna”.

Proses produksi dan diseminasi data/informasi statistik harus berdasarkan dan memenuhi standar kualitas secara internasional, dan setiap NSO harus menjamin kualitas tersebut melalui instrument Quality Assurance Framework (QAF).

Pembangunan QAF di BPS merujuk pada standar internasional yang disediakan UNSD: *National Quality Assurance Framework* (NQAF)

[NQAF 8] menjamin komitmen kualitas (*assuring the quality commitment*)
NSO harus berupaya keras menjamin kualitas produknya dan mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya.

6 DIMENSI KUALITAS DATA



- Petugas
- Pengawasan
- *Editing Coding*
- Pengolahan

PEMBAGIAN BAB NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK)

1
Ketentuan Umum

2
Penyelenggara

3
Perencanaan

4
Penyelenggaraan

5
Pembiayaan

6
**Pembinaan dan
Pengawasan**

NORMA/PRINSIP STATISTIK (1)

1

Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat

2

Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual

3

Statistik mengacu pada standar ilmiah

4

Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan

5

Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden

NORMA/PRINSIP STATISTIK (2)

6

Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya

7

Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

8

Penyelenggaraan statistik mendukung pencapaian sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif

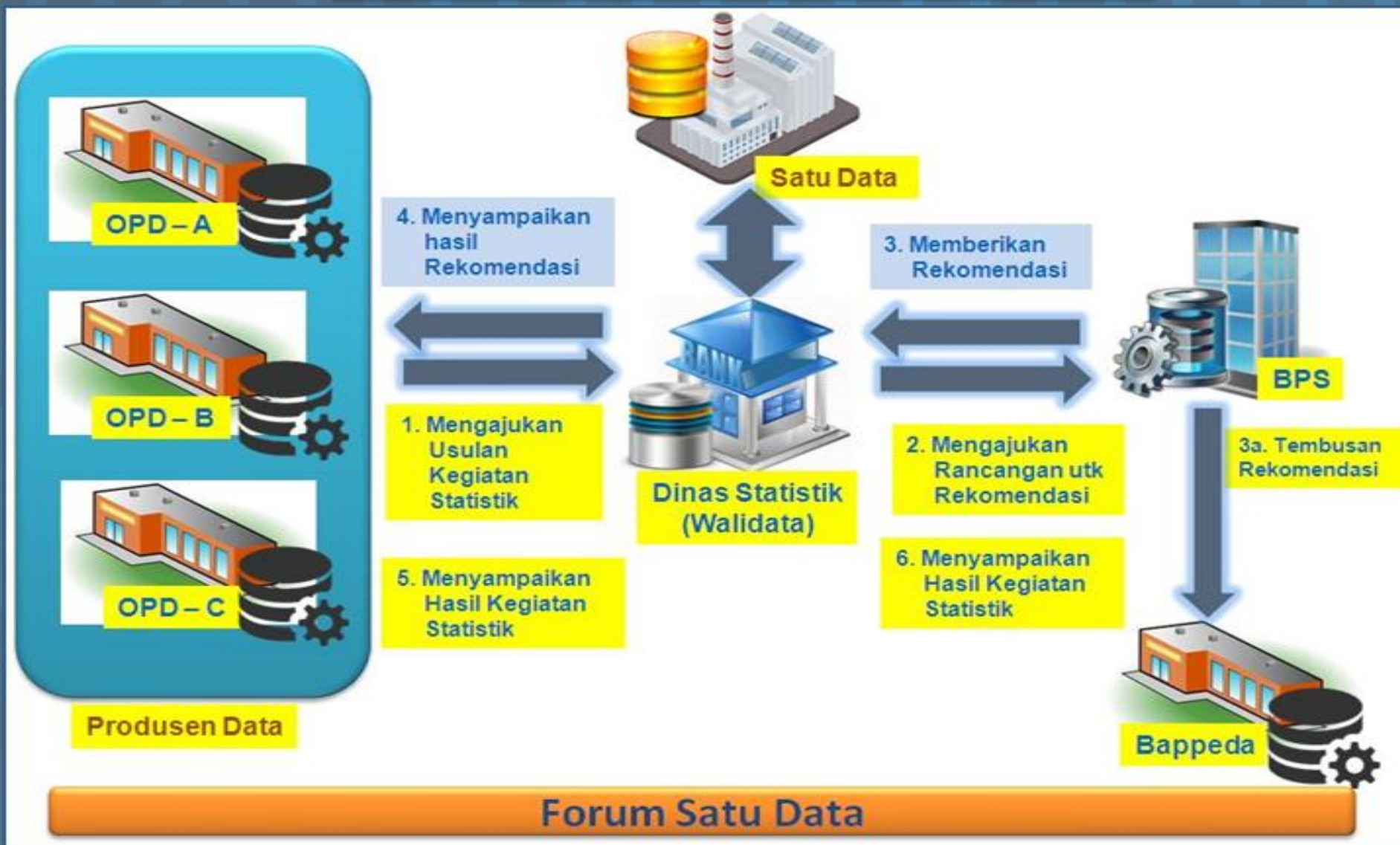
9

Penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik

10

Penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional

PROSEDUR



KEBUTUHAN STATISTIK SEKTORAL

KEBUTUHAN DATA SEKTORAL

TIDAK SEMUA DATA DAPAT DIPENUHI OLEH BPS

“BPS Fokus Pada Statistik Dasar yang Bersifat Makro dan Lintas Sektoral”

Setiap Institusi Pemerintah Memiliki Ke-khas-an Dalam Ragam Data

Setiap Institusi Memiliki Pendekatan Dalam Penyediaan
Data Dan Informasi Untuk Perencanaannya

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)



DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Data yang berkualitas sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien

DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

PN1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

No.	Indikator	Stat. Dasar	Stat.Sektoral
1	Penghitungan Persentase Penduduk Miskin	√	
2	Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia	√	
3	Jumlah Penerima BLSM/KSKS, Rastra, KIP, KISS		√
4	Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk		√
5	Rasio Guru (SD,SMP, SMA) per Penduduk		√
6	Jumlah Pencari Kerja dibanding angkatan Kerja		√
7	Updating data Kemiskinan by name by address		√

DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

PN2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

No.	Indikator	Stat. Dasar	Stat.Sektoral
1	Penghitungan Indikator Gini Ratio	√	
2	Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	√	
3	Kompilasi Data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir	√	
4	IRIO	√	
5	Penghitungan Upah Menurut Sektor Ekonomi (Min- Max)		√
6	Penghitungan Jumlah Toko/Ruko, Supermarket, Pasar		√
7	Jumlah Nelayan Tangkap (Perairan Umum, Laut)		√
8	Jumlah Nelayan Budidaya termasuk Rumput Laut		√
9	Jumlah Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal P. Ikan		√

DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL (STAT DASAR)

PN3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

No.	Indikator	Stat. Dasar	Stat.Sektoral
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	√	
2	Data dan Informasi Statistik Ekonomi Kreatif	√	
3	Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP)	√	
4	Pariwisata	√	
5	Ekonomi Kreatif	√	
6	Jumlah Perusahaan dan Realisasi PMA dan PMDN per sektor per tahun		√
7	Updating Usaha Mikro Kecil dan Menengah by name by adress per tahun		√
8	Jumlah Prsh.Industri Mikro, Kecil, Menengah dan Omset, Tenaga Kerjanya		√
9	Jumlah Rumah Produksi, Sanggar Tari dan event Budaya		√
10	Jumlah Petani, produksi, nilai jual per Komoditas per tahun;		√

DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL (Stat DASAR)

PN4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

No.	Indikator	Stat. Dasar	Stat.Sektoral
1	Survei Pertanian Tanaman Pangan (Ubinan)	√	
2	Pengukuran luas Kerangka Sampel Area	√	
3	Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)	√	
4	Konversi Gabah ke Beras	√	
5	Jumlah konsumsi pangan menurut Rumah Tangga, Industri, Restoran/RM, RS serta Rumah Tahanan		√
6	Jumlah dan Nilai Penjualan serta Penyaluran Bibit, Pupuk dan Benih		√

DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL (STAT DASAR)

PN5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

No.	Indikator	Stat. Dasar	Stat.Sektoral
1	Penghitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	√	
2	Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	√	
3	Penyusunan Statistik Kriminal	√	
4	Jumlah kasus Korupsi diproses ke Pengadilan dan yang diputus bebas		√
5	Jumlah Perda, Pilkada, Caleg, Calon Kepala Daerah dan Pemilih		√
6	Jumlah Narapidana, Jumlah kasus kriminal berdasar kelompok (Polisi, Jaksa, diputus Pengadilan)		√

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

- ❑ Salah satu isu strategis pembangunan bidang ekonomi adalah **“DATA DAN INFORMASI STATISTIK”**
- ❑ Tuntutan pengguna data terhadap ketersediaan data dan informasi statistik semakin beragam dan berkualitas

DATA DAN INFORMASI STATISTIK

SASARAN

No.	Indikator	Target
1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data Statistik	80,00%
2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	94,00%
3	Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien	13 self assesment
4	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	84,00%
5	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	150 metadata

DATA DAN INFORMASI STATISTIK

ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan data statistik pada tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), serta konsisten (*coherent*); untuk dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

DATA DAN INFORMASI STATISTIK

PROGRAM

1. Pengembangan data dan statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi prioritas nasional
2. Pelaksanaan survei periodik yang wajib dilaksanakan pada tahun 2019
3. Penyediaan data untuk memenuhi kebutuhan indikator SDGs
4. Penguatan Sistem Statistik Nasional
5. Perwujudan Satu Data Indonesia
6. Penyediaan data rutin untuk menjaga keberlanjutan data
7. Peningkatan kualitas data statistik

PEMBINAAN STATISTIK DI DAERAH

DASAR

Badan melakukan pembinaan agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional.

(Ps 31 UU 16/1997)

BPS melakukan pembinaan bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau Unsur Masyarakat lainnya

(Ps 58 PP 51/1999)

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh Menteri, untuk pembinaan umum; dan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;

(Ps 3 PP 12/2017)

TUJUAN PEMBINAAN STATISTIK

1. Meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik
2. Membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional
3. Mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN)
4. Mendukung pembangunan nasional

SASARAN PEMBINAAN STATISTIK

- 1. Penyelenggara kegiatan statistik**
- 2. Responden**
- 3. Pengguna statistik**



UPAYA PEMBINAAN STATISTIK

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
2. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
3. Peningkatan penyebaran informasi statistik;
4. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik;
6. Pengembangan statistik sebagai ilmu;
7. Pengembangan sistem informasi statistik;
8. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya.
9. Staf Diskominfo bisa magang di BPS Daerah

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN STATISTIK DAERAH

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik

1. Dikoordinasikan dengan BPS Provinsi
2. BPS menyediakan Modul dan Trainner (Prov / Pusdiklat)
3. Pembiayaan melalui APBD



VS Januari 2018

AZ Januari 2018



Terima Kasih

Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua